

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PASIR BATU MANDI KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018

Oleh: Ratih Sanima

Email: rsanima@yahoo.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) is one of the government's strategic programs in the context of realizing clean and healthy living communities through the provision of community-based water supply and sanitation services. Indragiri Hulu District has been implementing the PAMSIMAS program since 2008. The number of villages that received the PAMSIMAS program is spread out in each sub-district. The majority of non-functioning villages is in Sungai Lala and Pasir Batu Mandi sub-district is the village that receives the lowest percentage of proper sanitation compared to other villages since more than half of the villagers does not have access to proper sanitation.

This research aims to know the evaluation of the PAMSIMAS program and the factors that hampers the evaluation of the PAMSIMAS program in Pasir Batu Mandi Village in 2018. The location of the research is in Pasir Batu Mandi Village, Sungai Lala sub-district, Indragiri Hulu District. Furthermore, data collection technique is carried out by using interview and documentation.

The results of the research indicate that the evaluation of PAMSIMAS program in Pasir Batu Mandi Village in 2018 uses six indicators of evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. From all these aspects, it can be seen that the construction of the PAMSIMAS program is done well physically but the research shows that various achievements before and after the program have not changed for a better provision of clean water and sanitation to the community. PAMSIMAS is not used by the community since the village is along the riverbank. The budget of the PAMSIMAS program runs smoothly but the results given at the PAMSIMAS sustainability stage are in a non-functioning condition (red) and the inhibiting factors affecting the PAMSIMAS program include external factors namely unchanging of people's lifestyle, lack of community participation in the PAMSIMAS program, unfunctional facilities and drought springs. While internal factors, namely lack of coordination and less active BPSPAMS.

Keywords: *Pamsimas, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Leveling, Responsiveness, Accuracy*

Pendahuluan

Pamsimas merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Lingkup pembangunan desa antara lain: pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya air minum dan sanitasi. Salah satu pembangunan desa yang di atur dalam Undang-Undang tersebut adalah pembangunan lokal skala desa melalui konsep desa membangun, dimana pendekatan ini didukung oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang seperti di uraikan di atas, pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan di bidang air minum dan sanitasi. Sehingga dalam pelaksanaan program Pamsimas tingkat desa sangat diharapkan adanya peran dari pemerintah desa untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program.

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Program Pamsimas menerapkan asas dekonsentrasi yang diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Pamsimas di daerah kabupaten dan kota. Dekonsentrasi Program Pamsimas dilakukan dengan strategi salah satunya melakukan sharing dana untuk pembangunan sarana air minum dan kegiatan sanitasi di desa sasaran, dimana apabila desa didanai APBN maka pembiayaan dibagi 70% berasal dari APBN, 10% berasal dari APBDes dan kontribusi in-cash dan in-kind sebesar 20%.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan

partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Program Pamsimas dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat. Sasaran program Pamsimas adalah Kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan Kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersangkutan. Target desa sasaran program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020).

Pendanaan program Pamsimas melalui sumber dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dana kontribusi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pamsimas lingkup Kabupaten. Secara operasional Bupati akan dibantu Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Pokja AMPL Kabupaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Keputusan Bupati Indragiri Hulu NOMOR:Kpts.276/IV/2018 telah menetapkan tim pengarah dan tim teknis

Pokja AMPL di Kabupaten Indragiri Hulu. Peran utama Pokja AMPL Kabupaten adalah untuk memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan pedesaan, termasuk untuk program Pamsimas.

Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan program Pamsimas sejak tahun 2008. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 178 desa dan 14 Kecamatan. Jumlah desa yang menerima Pamsimas tersebar di setiap Kecamatan. Sampai saat ini, total desa yang menerima bantuan Pamsimas adalah 130 Desa, dari 130 desa penerima Pamsimas, sebanyak 75 desa (57,7%) berstatus hijau atau berfungsi, sebanyak 48 desa (36,9%) berstatus kuning atau berfungsi sebagian, dan sebanyak 7 desa (5,4%) berstatus merah atau tidak berfungsi. Mayoritas desa yang tidak berfungsi terdapat di Kecamatan Sungai Lala yaitu 3 desa (50%) dari total desa penerima Pamsimas di Kecamatan Sungai Lala. Desa Pasir Batu Mandi merupakan desa yang memiliki persentase terendah terhadap sanitasi yang layak, akses masyarakat terhadap air bersih juga belum memadai.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Akses Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2012 dan 2018

Tahun	Jumlah		Rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum dan sanitasi layak			
	Penduduk (jiwa)	Rumah tangga (rumah/kk)	Sarana air minum (rumah/kk)		Sarana sanitasi (rumah/kk)	
			Jlh	%	Jlh	%
2012	465	118	9	8	12	10
2018	836	167	15	9	52	31

Sumber: Buku I RKM Desa Pasir Batu Mandi Kec. Sungai Lala Tahun 2012 dan Kinerja BPSPAM Pedesaan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012

rumah tangga yang memiliki akses awal terhadap sarana air minum layak hanya 9 KK dari 118 KK (8%), pada tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak hanya 15 KK dari 167 KK (9%), hal ini menunjukkan bahwa setelah 6 tahun berlalu, jumlah penduduk dengan akses air minum layak hanya meningkat 1%. Sedangkan untuk jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak pada tahun 2012 hanya terdapat 12 KK dari 118 KK (10%), untuk tahun 2018 terdapat 52 KK dari 167 KK (31%), hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak meningkat 21%.

Kontribusi masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk berjalannya program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi. Kontribusi masyarakat 20% dari RKM yang disetujui berupa 4% uang tunai (incash) yaitu Rp. 11.000.000 dan 16% tenaga/material (inkind) yaitu sebesar Rp.44.000.000.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fenomena dan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya rasa tanggung jawab aparat desa maupun masyarakat terhadap pemeliharaan sarana Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi. Hal ini dibuktikan dari status keberfungsian sarana Pamsimas yang merah atau tidak berfungsi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pasir Batu Mandi dalam program Pamsimas ini yang dibuktikan dengan tidak adanya iuran pemeliharaan sarana Pamsimas dari masyarakat Desa Pasir Batu Mandi.
3. Target Pamsimas yang tidak tercapai dan penggunaan sarana Pamsimas yang tidak efektif.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pamsimas itu sendiri.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana evaluasi program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat evaluasi program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi tahun 2018?

Kerangka Teori

William N Dunn mengidentifikasi enam kriteria yang menentukan evaluasi kebijakan publik yaitu:

1. Eektifitas
Berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi
Berkenaan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan
Berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan
Berkenaan dengan apakah biaya manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas
Berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu
6. Ketepatan
Berkenaan dengan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

HASIL PENELITIAN

A. Evaluasi Program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

1. Efektifitas

Stakeholders sudah memahami program dan arti penting Pamsimas untuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi. Program ini mampu menyediakan bertambahnya akses terhadap air bersih dan penyediaan sanitasi bagi warga. Hal ini ditunjukkan capaian akses air minum Kabupaten Indragiri Hulu menyumbang 15% dari pencapaian Provinsi Riau. Artinya pencapaian target kinerja daerah dikategorikan cukup efektif jika dibandingkan dari target RPJMN 2019 yang hanya tertinggal 18% dari 100% pencapaian keseluruhan, namun di Kabupaten Indragiri Hulu masih ditemukan desa penerima Pamsimas belum Stop BABS. Desa Pasir Batu Mandi merupakan salah satu desa yang belum Stop BABS, hal ini disebabkan semua dusun di Desa Pasir Batu Mandi terletak di sepanjang pinggir sungai sehingga kondisi kesehatan dan perilaku masyarakat kurang baik.

Sejalan dengan pendekatan *bottom-up*, pelatihan dan berbagai kegiatan kemitraan masyarakat dengan pemerintah diarahkan pada partisipasi masyarakat. Fasilitator telah melaksanakan perannya dalam melakukan sosialisasi tingkat desa dan mendampingi dalam penyusunan proposal termasuk dalam pembentukan tim penyusunan proposal dan kader AMPL serta termasuk memfasilitasi mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan.

Peran fasilitator berjalan baik, namun terdapat kendala pada partisipasi aktif masyarakat dalam program prioritas Pamsimas yang dicanangkan dalam upaya penyediaan air bersih dan sanitasi yang sehat. Kontribusi

masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan Pamsimas.

Implementasi program Pamsimas masih belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah. Hal ini menunjukkan masyarakat seharusnya mempunyai rasa memiliki dengan kadar yang tinggi terhadap program Pamsimas untuk tercapainya tujuan Pamsimas dan untuk mencapai tujuan Pamsimas itu harus diselidiki apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi supaya bisa diselesaikan dengan baik demi tercapainya tujuan Pamsimas.

Kewenangan pengelolaan program Pamsimas berada pada BPSPAMS dan pengelolaan tersebut tidak efektif terlaksana. Hal ini ditunjukkan oleh adanya permasalahan dimana anggota BPSPAMS tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan pemungutan iuran sehingga banyak fasilitas yang rusak seperti kran umum. Hal ini membuat pendistribusian air dan pemeliharaan sarana tidak dilakukan dan tidak adanya bantuan pemeliharaan sarana yang dilakukan Pemerintah Desa.

Secara umum program penyediaan air bersih ini dapat dikatakan tidak efektif dari pencapaian peran dan target kinerja Program Pamsimas yang seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu tersedianya air bersih untuk berbagai keperluan dasar hidup masyarakat dan sanitasi pada kelompok sasaran.

2. Efisiensi

Pemanfaatan sumber daya menjadi poin kunci untuk mencapai efisiensi. Program ini berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Penyediaan sarana air minum tingkat desa dan peri-urban, serta sarana sanitasi sekolah melalui pendekatan berbasis masyarakat:

1. Pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat,
2. Masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum,
3. Masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana,
4. Masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggungjawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, dan
5. Penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.

Dalam program Pamsimas Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, pemanfaatan sumberdaya secara optimal masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Ketidakefisienan masih terjadi pada sumberdaya manusia dalam eksekusi program dan kegiatan Pamsimas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya organisasi pengelola Pamsimas belum berjalan dengan baik. Komitmen desa diperlukan sekali, sehingga mampu merubah kebiasaan masyarakat terhadap PHBS meningkat.

Berdasarkan laporan rekapitulasi rencana dan realisasi kegiatan Pamsimas, realisasi anggaran operasional diambil

70% dari APBN sebesar Rp. 192.500.000,- 10% dari APBD sebesar Rp. 27.500.000,- dan kontribusi masyarakat sebesar Rp. 11.000.000 (4% *Incash*) dan Rp. 44.000.000,- (16% *Inkind*) dibangun untuk mendukung ketersediaan penampungan dan penyediaan air.

Selain itu, pemanfaatan SDM masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus sehingga perlu peningkatan SDM dalam pengelolaan Pamsimas ke depan. Beberapa informan bahkan menunjuk pada profesionalitas pengurus yang belum nampak apabila ada permasalahan di lapangan. Hal ini dikemukakan oleh beberapa masyarakat:

“Apabila terjadi masalah, pengurus belum mampu secara profesional meng-handle hal tersebut. Mereka seperti kaget dan tidak bertindak cepat untuk menanggulangnya.”

Pemanfaatan sumberdaya manusia yang belum maksimal diimplementasikan. Titik berat pemanfaatan SDM terletak pada profesionalitas pengurus Pamsimas yang masih belum mampu memecahkan permasalahan di lapangan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk keberlangsungan program.

Secara umum program Pamsimas ini dapat dikatakan efisien dari sisi ketersediaan anggaran, namun dari sisi kualitas SDM yang dimiliki belum sepenuhnya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan PHBS.

3. Kecukupan

Dalam mengevaluasi kebijakan, evaluator perlu melihat sudah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Kebijakan atau program dibuat untuk membantu memecahkan masalah publik. Program harus dapat meringankan masalah di

lingkungan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak lagi terhambat. Karenanya, pelaksana kebijakan juga mesti tahu apa yang dihadapi masyarakat sehingga tidak salah memberikan pemecahan masalah.

Pelaksanaan program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi pada awalnya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Desa yang telah memfasilitasi dan dibantu oleh tim fasilitator dari Kabupaten dan Provinsi serta POKJA AMPL Kabupaten Indragiri Hulu. Namun setelah peresmian program Pamsimas semua pengelolaan diberikan tanggung kepada BPSPAMS, sehingga semua kebijakan seterusnya diputuskan oleh BPSPAMS dan masyarakat pemanfaat. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pengelola BPSPAMS dalam melakukan pemeliharaan sarana dan perbaikan fasilitas, dimana tanpa ada bantuan perbaikan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah yang terlihat jelas tidak adanya *cost-benefit* pada keberlanjutan Pamsimas ini.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyikapi bahwa permasalahan yang timbul dimulai dari tidak berjalannya fungsi dan peranan BPSPAMS pada program Pamsimas. Dimana seharusnya hasil pelaksanaan Pamsimas pada tahun 2018 mampu melayani penduduk mencapai 465 jiwa dan juga seharusnya melalui program Pamsimas dapat banyak membantu masyarakat dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi dengan mengubah perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan mulai membuat jamban dirumah masing-masing. Salah satu program komplementer yang dijalankan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Pemucuan disini adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas

kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan menunjuk pada hasil dan *output* kebijakan yang adil didistribusikan kepada kelompok penerima. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali informasi kepada informan apakah hasil Pamsimas dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulannya adalah masyarakat enggan untuk merubah kebiasaan hidup seperti MCK yang bergantung pada sungai, serta adanya iuran-iuran biaya lain yang membebani masyarakat meskipun hal ini dapat berdampak terhadap kesehatan mereka sendiri dan lingkungan.

5. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas atau tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan.

Program Pamsimas ini mendapat respon yang positif dari pemerintah melalui instansi terkait namun bertolak belakang dari masyarakat. Responsivitas dalam penelitian ini bisa dijabarkan kedalam dua hal yaitu: kebijakan pemerintah dalam program Pamsimas apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau belum, dan

bagaimana respon dari masyarakat setelah adanya program Pamsimas.

Sejauh ini respon masyarakat terhadap dengan adanya program Pamsimas sangat kecil sekali hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti juga berdasarkan tanggapan dari informan. Adanya program Pamsimas tidak mampu merubah kebiasaan masyarakat Desa Pasir Batu Mandi untuk meningkatkan kesadaran PHBS dan stop BABS.

6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan merujuk pada tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai adalah pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ketepatan program Pamsimas tidak tercapai pada Desa Pasir Batu Mandi karena masyarakat menolak dalam merubah kebiasaan dan pola pikir yang masih ketergantungan pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari sungai.

Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi dapat dikatakan belum mampu menjawab aspek ketepatan dalam evaluasi kebijakan publik karena program ini benar-benar tidak tepat diimplementasikan pada masyarakat sasaran yang memang berada di sepanjang pinggir sungai sehingga dalam hal penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak diperlukan.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Koordinasi

Pengelolaan PAMSIMAS di tahap perencanaan dan pelaksanaan program melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat kabupaten Dinas PUPR sebagai

instansi pembangunan di sektor fisik, Dinas Kesehatan beserta Puskesmas sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor pembangunan non fisik seperti melakukan pemecuan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, dan BAPPEDA sebagai pemberi arahan pembangunan, melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program. Di tingkat Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan unit Pengelola seperti LKM dan BPSPAMS yang berasal dari masyarakat dan dukungan bimbingan dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari tiga orang dengan bidang yang berbeda-beda satu orang fasilitator bidang teknik yang mendampingi dalam perencanaan dan pembangunan fisik sarana air minum dan sanitasi, satu orang fasilitator bidang pemberdayaan yang mendampingi masyarakat di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat, dan fasilitator bidang STBM yang bekerja mendampingi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Masing-masing *stakeholder* di tahap awal program saling berkoordinasi dengan baik, hanya saja ketika pada tahap keberlanjutan koordinasi tersebut terputus, sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan tidak bisa diselesaikan yang akhirnya berdampak pada ketidakberfungsian Pamsimas.

b. Kurang aktifnya BPSPAMS

BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) adalah badan yang dibentuk melalui peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 yang secara struktur berada di bawah koordinasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dan fungsi utama BPSPAMS adalah untuk mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang terbangun sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima

manfaat, serta melakukan kegiatan promosi kesehatan.

Fungsi keberadaan badan pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting perannya untuk keberlanjutan program pengelolaan sarana prasarana air bersih. Sarana air bersih merupakan sarana umum milik publik, dimana semua orang yang mendapatkan program berhak menggunakannya. Jadi pengelolaan sarana air bersih sangat penting demi kelancaran ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPSPAMS Desa Pasir Batu Mandi tidak mampu mengelola organisasi dan administrasi dengan baik dan tidak memiliki aturan baku dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana yang ada, hanya menggunakan dan memanfaatkan sarana yang ada namun pemeliharannya tidak dengan kata lain tugas dan fungsi BPSPAMS tidak berjalan.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Desa Pasir Batu Mandi berada di tepi sungai, masyarakat lebih sering memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Tabel 3.1
Jumlah KK yang BABS Desa Pasir Batu Mandi

No	Jumlah KK	Jumlah KK BABS
1	118	108

Sumber: Profil Desa Pamsimas 2012

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Pasir Batu Mandi belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Perilaku buang air besar sembarangan merupakan perilaku yang dapat menyebarkan kuman penyakit. Stop BABS adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak melakukan perilaku buang air besar yang berpotensi menyebarkan penyakit. Kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sungai sebagai MCK ini sangat sulit dirubah.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pamsimas

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam program Pamsimas, karena Pamsimas sendiri merupakan program yang berbasis masyarakat, masyarakat dituntut untuk partisipatif dalam program Pamsimas ini, seluruh lapisan masyarakat miskin ataupun kaya menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahap kegiatan Pamsimas.

Masyarakat Desa Pasir Batu Mandi tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan Pamsimas ini, mereka tidak mau menyambungkan pipa ke rumah dan tidak mau membuat jamban sendiri di dalam rumah.

Masyarakat Desa Pasir Batu Mandi Juga enggan membayar iuran pemeliharaan yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama yaitu sebesar Rp.50.000,00/tahun, dimana iuran ini seharusnya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan swakelola yang tertuang dalam RKM dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat hanya di awal saja sebelum dibangunnya Pamsimas, setelah Pamsimas terbangun, masyarakat tidak peduli dan terkesan cuek, masyarakat

tidak mau menyambungkan pipa ke rumah mereka, masyarakat juga tidak mau melakukan iuran pemeliharaan, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu Pamsimas.

c. Fasilitas Tidak Berfungsi

Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi saat ini dalam kondisi tidak berfungsi dikarenakan masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan ini dan juga masyarakat merasa Pamsimas adalah kegiatan pemerintah sehingga segala sesuatu terkait Pamsimas menjadi urusan pemerintah, masyarakat hanya menerima manfaat saja. Sehingga dari awal Pamsimas selesai dibangun masyarakat masih memanfaatkan Pamsimas meski hanya untuk acara tertentu saja seperti syukuran warga atau pesta pernikahan bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Status keberfungsian sarana Pamsimas Desa Pasir Batu Mandi ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.2
Keberfungsian Sarana Penyediaan Air Minum Dan Sarana Sanitasi Desa Pasir Batu Mandi Tahun 2018

Jenis SPAM yang dibangun	Jumlah Sarana	Status Keberfungsian Sarana	Status Keberfungsian
PMA	1 unit	Tidak Berfungsi	Merah
Tower	1 unit	Tidak Berfungsi	
Kran Umum	1 unit	Tidak Berfungsi/Rusak	
Perpipaan	1400m	Tidak Berfungsi/Rusak	
Mesin Pompa + Diesel	1 unit	Tidak Berfungsi/Rusak	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu, 2018.

Sarana yang tidak berfungsi ini menandakan bahwa tidak terjadinya pemeliharaan sarana Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Evaluasi program Pamsimas di Desa Pasir Batu Mandi tahun 2018 menggunakan enam indikator kriteria evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari keseluruhan aspek tersebut terlihat bahwa pembangunan program Pamsimas secara fisik terlaksana dengan baik tetapi penelitian menunjukkan bahwa berbagai capaian sebelum dan sesudah program tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada penyediaan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat. Pamsimas tidak digunakan oleh masyarakat dikarenakan desa berada di sepanjang pinggiran sungai. Anggaran program Pamsimas berjalan dengan lancar tetapi hasil yang diberikan pada tahap keberlanjutan Pamsimas berada dalam kondisi tidak berfungsi (merah). Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi program Pamsimas meliputi faktor eksternal yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas, fasilitas tidak berfungsi. Sedangkan faktor internal yakni kurangnya koordinasi dan kurang aktifnya BPSPAMS.

2. Saran

1. Perlunya kajian ulang dalam menetapkan lokasi program Pamsimas oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dengan melihat berbagai aspek terutama partisipasi masyarakat terhadap program Pamsimas.
2. Perlunya meningkatkan penyuluhan kesehatan dalam mendorong perilaku masyarakat dan menanamkan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PHBS.

3. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan Pamsimas, salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus mengenai tata kelola penyediaan air bersih dan manajemen proyek yang merupakan hal penting dikedepankan dalam rencana pengembangan SDM pengelola.
4. Perlunya melibatkan lembaga keuangan, baik dari pemerintah ataupun swasta (perbankan) untuk memberikan dana bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat sasaran yang kurang mampu/belum mempunyai sambungan dan jamban di rumah agar memberikan kemudahan dalam pemasangan sambungan rumah sehingga seluruh sasaran program tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin. Said Zainal, 2011, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino. Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Bungin. Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana
- Dunn. William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handoyo. Eko, 2012, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya
- Indiahono. Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*

Analisis, Jakarta: Anggota IKAPI DIY

- Islamy. M Irfan, 2014, *Kebijakan Publik*. Banten: Universitas Terbuka
- Martono. Nanang, 2015, *Metode Penelitian sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Moeloeng. Remy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* Bandung: PT.Remaja Rosdakaya
- Nasution, 2011, *Metode Research*, Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Nogi. Hessel, 2008, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Nugroho. Riant D, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta:Gramedia
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto Bagong dan Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternatif Pendekatan*. Jakarta:Kencana
- Syamsi. Ibnu, 1994, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Ikapi
- Jurnal:**
- Nurdiani. Nina, 2014, *Teknik Sampling Snowball dalam penelitian lapangan*, ComTech, Vol. 5 No. 2
- Sukarman, 2017, *Prinsip Governace dalam Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing*

*Tinggi Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2014- 2016, JOM
FISIP Vol. 4 No. 2*

Taufik Afriadi dan Hadi Wahyono. 2012.
*Partisipasi Masyarakat dalam
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
di Kecamatan Simpur Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Jurnal
Pembangunan Wilayah dan Kota.
Volume 8 (4): 341-348 Desember
2012*

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun
2014 Tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 122 Tahun 2015 Tentang
Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat

Website:

mis.pamsimas.org/cermin/cermin.php?thn=2012&dana=all&tipe=all&kode=14021004 di akses pada tanggal 14 April 2019

mis.pamsimas.org/keberlanjutan di akses pada tanggal 23 Maret 2019

mis.pamsimas.org/laporan di akses pada tanggal 23 Maret 2019

new.pamsimas.org di akses pada tanggal 06 April 2019